

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa bagian terdiri atas latar belakang yang merupakan alasan peneliti dalam mengambil masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang merupakan pembagian masalah-masalah yang menjadi batasan dalam penelitian, definisi operasional yang berisi uraian yang digunakan untuk mempermudah pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menjelaskan masalah pada penelitian, tujuan dan manfaat yang merupakan tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan ruang di perkotaan saat ini sudah sangat intensif digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seiring dengan semakin tingginya pemanfaatan akan ruang maka permasalahan yang sering timbul adalah adanya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Banyaknya potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui (Tarigan, 2003:8). Untuk itu, diperlukan perencanaan dalam pemanfaatan ruang yang terbatas ini. Dengan adanya perencanaan pemanfaatan ruang yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sebagian pihak namun sebagian pihak namun dapat menampung semua kebutuhan masyarakat. Perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia serta manfaatnya untuk kepentingan kebutuhan manusia.

Kegiatan pembangunan dan aktivitas manusia yang semakin tinggi dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan yang semakin kompleks sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, sejak tahun 1992 diberlakukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta Perda Kota Tasikmalaya tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) yang dirancang untuk memadukan berbagai pengaturan ruang yang bersifat sektoral menjadi suatu kesatuan yang saling berkait dan memberi tempat bagi keperluan semua sektor serta memelihara fungsi lingkungan hidup. Undang-undang tersebut merumuskan kawasan budidaya dan kawasan lindung serta ketentuan-ketentuan perencanaan dan penggunaan ruang yang lebih maju tidak hanya dari aspek fisik ruang, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan.

Permasalahan kota merupakan salah satu bidang kajian yang sangat menarik, karena kompleksitas permasalahan yang dimilikinya. Beberapa faktor yang dikenal sebagai salah satu penentu dinamika kehidupan kota yang sangat tinggi yaitu faktor kependudukan dan faktor kegiatan penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan akan ruang dan frekuensi kegiatan penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Konsekuensi keruangan yang sangat jelas yaitu meningkatnya tuntutan akan ruang untuk mengakomodasikan sarana atau struktur fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut (Yunus, 2005:55-57). Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota terjadi akibat

dari adanya perubahan dan tuntutan dari manusia di dalam melaksanakan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja terutama di sektor formal sehingga penduduk mencari alternatif pekerjaan lain. Ketidakmampuan sektor formal dalam menampung penduduk usia kerja, adanya kesempatan kerja di sektor informal yang menjadi salah satu pilihan karena keterbatasan peluang kerja di sektor formal, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Hoer Effendy, 2000:46). Terbatasnya daya tampung lapangan pekerjaan di sektor formal menyebabkan munculnya sektor informal yang dijadikan alternatif pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.

Keberadaan sektor informal saat ini menjadi sangat penting dan menarik perhatian terutama bagi para penentu kebijakan, karena sikap kemandiriannya dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah serta peranannya sebagai salah satu pilihan dalam menciptakan kerja yang dapat mencegah meningkatnya pengangguran dan keresahan sosial (Simanjuntak, 1985:99). Disamping itu sektor informal sangat menarik karena dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kecenderungan sosial ekonomi kepada penentu kebijakan disuatu kota.

Dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal dalam hal ini PKL tidak selalu mendatangkan masalah dalam aktivitas perkotaan namun terdapat sisi positif dalam sektor informal tersebut. Sektor informal dapat

dianggap sebagai sabuk penyelamat yang menyerap kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal (Sunyoto, 2006:50). Akan tetapi di lain pihak, ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap seluruh angkatan kerja mengakibatkan sebagian angkatan kerja, terutama yang sedang mencari pekerjaan, dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga keterbatasan lapangan pekerjaan terutama di sektor formal ini dipandang sebagai suatu tantangan. Jalan keluar untuk mengatasi tantangan ini adalah harus keluar dari pasar tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu sektor informal di perkotaan yang paling menonjol dan relatif khas adalah kegiatan di sektor perdagangan, dan ciri yang umumnya terlihat di negara berkembang seperti Indonesia (Bromley dalam Manning dan Effendi, 1996:228-230) adalah usaha Pedagang Kaki Lima atau lebih dikenal dengan sebutan PKL. Kekhasan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan. Usaha PKL tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, cukup memiliki sedikit keterampilan dan sedikit modal, asal ada kemauan yang membuat mereka mampu melakukan kegiatan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Jumlah PKL terutama di kota-kota besar diperkirakan akan terus bertambah oleh karena sektor ini tidak menuntut pendidikan yang tinggi, keterampilan tertentu, modal usaha yang relatif kecil serta variasi pilihan yang cukup luas. Selain itu, PKL memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah dan lebih dari itu, sektor ini mampu memberikan lapangan pekerjaan, menunjang ekonomi penduduk

dan pemerataan kesejahteraan. Semakin tingginya kebutuhan manusia yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan ekonomi menyebabkan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah mencari alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhan yang salah satunya disediakan oleh sektor informal terutama sektor perdagangan yakni PKL.

Kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum (Sulistyo, 2006:2). Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap PKL oleh masyarakat menjadikan keberadaan para PKL pun semakin banyak terutama masyarakat yang kelas menengah ke bawah yang ekonominya relatif rendah.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban dan penataan terhadap PKL ternyata dirasa belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan hingga saat ini. Alternatif-alternatif yang telah dirumuskan oleh para ahli perkotaan, pengelola kota dan arsitek belum menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penataan terhadap aktivitas PKL tersebut, oleh pemerintah belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus dalam penataan ruang kawasan perkotaan sehingga dalam produk penataan kota tersebut belum diarahkan ruang dan penataan untuk PKL (Lintang, 2006:3)

Di kota Tasikmalaya, pengamatan sementara peneliti keberadaan PKL sudah sangat banyak. PKL banyak ditemui di jalan jalan, kompleks pasar serta tempat-tempat umum ramai lainnya. Keberadaan PKL yang berlokasi tidak pada

tempatnyanya mengakibatkan sering terganggunya berbagai aktivitas di perkotaan sehingga jika tidak segera ditangani dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan dan tata ruang kota.

Keberadaan PKL di Kota Tasikmalaya yang menempati lokasi-lokasi yang bukan peruntukkannya seperti taman kota, trotoar, bahu jalan, halaman toko ataupun pekarangan rumah penduduk sehingga sering dianggap mengganggu dan menurunkan citra perkotaan yang telah direncanakan sebelumnya. Ketidakteraturan lokasi aktivitas, bentuk fisik tempat berjualan yang beragam dan terkesan asal-asalan sehingga terkesan kumuh semakin mengurangi keindahan dan ketertiban tata Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan adanya keterpaduan antara keberadaan PKL dengan tata ruang kota. Program pembangunan yang tidak hanya ditunjukkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, tetapi juga ditinjau dari keselarasan antara program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Dalam RTRW Kota Tasikmalaya pada umumnya keberadaan PKL secara spesifik kurang terakomodasi dalam hal perencanaan tata kota. Padahal PKL merupakan salah satu bagian dari masalah di Kota Tasikmalaya, karena keberadaan PKL sering berbenturan langsung dengan Peraturan Daerah.

Maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti hal tersebut, sehingga penulis mengambil Judul **“KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAAN KOTA DI TASIKMALAYA”** dalam penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi berjualan PKL?
3. Bagaimanakah keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam tata ruang Kota Tasikmalaya?

## C. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAAN KOTA DI TASIKMALAYA”

1. PKL memiliki pengertian yang sama dengan *”hawkers”*, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar (Mc.Gee dan Yeung dalam Li ntang, 2006:33)

PKL yang dimaksudkan disini adalah pedagang yang berada di Kota Tasikmalaya yang berjualan di fasilitas-fasilitas umum seperti taman kota, pasar, trotoar, bahu jalan, halaman toko, perkantoran, sekolah dan juga pekarangan rumah penduduk.

2. Persebaran PKL adalah pola lokasi keberadaan PKL dalam aktivitas usahanya
3. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang disini merupakan penataan dan pemanfaatan ruang yang seharusnya tidak dijadikan lokasi berdagang oleh PKL .

4. Kota Tasikmalaya, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara astronomis pada  $08^{\circ}51'6''$  -  $08^{\circ}18'31,77''$  BT dan  $106^{\circ}16'46''$  -  $106^{\circ}27'25''$  LS, ±105 km dari Kota Bandung dan ibukotanya yaitu Jakarta ± 255 km terdiri atas 10 kecamatan, yang dibagi lagi atas 69 kelurahan. Wilayah kota ini terbentang dari Kecamatan Indihiang di bagian barat sampai ke Kecamatan Cibeureum di bagian timur.
5. Usaha pemerintah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur keberadaan PKL di Kota Tasikmalaya

#### **D. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi berjualan PKL
3. Menganalisis keberadaan Pedagang Kaki Lima dalam tata ruang Kota Tasikmalaya

#### **E. Manfaat**

Selain dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan bagi penulis, penulis juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya, yaitu:

1. Untuk intansi pemerintahan, sebagai data dan informasi mengenai sejauhmana manfaat dari keberadaan pedagang kaki lima bagi kehidupan masyarakat dan juga



kontribusi yang diberikan para pedagang kaki lima bagi pemerintah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Untuk intansi pemerintah, sebagai data dan informasi dalam penetapan rencana tata ruang wilayah Kota Tasikmalaya
3. Untuk PKL, dapat dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan akan upaya peningkatan usahanya
4. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pengembangan penelitian selajutnya.